

KEBIJAKAN UANG KULIAH TUNGGAL DALAM MENDUKUNG KESEJAHTERAAN MAHASISWA PENDEKATAN SOSIAL (STUDI PADA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2023)

Lusi Aprilia¹, Eny Inti Suryani², Yonnawati³

Universitas Lampung¹, Universitas Muhammadiyah Lampung^{2,3}
espadalusilia@gmail.com

ABSTRACT

The Single Tuition Fee Policy at the University of Lampung aims to establish a fair and equitable education financing system through the principles of cross-subsidization and tiered tuition fees based on students' economic capabilities. This study employs a qualitative approach to explore the impact of the Single Tuition Fee Policy on student welfare. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document studies involving students, practitioners, and relevant stakeholders.

The findings indicate that the Single Tuition Fee Policy has had a positive impact on access to higher education for students from diverse economic backgrounds, particularly by alleviating the financial burden for students from underprivileged families. However, the lack of clarity in determining the Single Tuition Fee mechanism and limited information about the appeal procedures have led to dissatisfaction among students. Another challenge identified is the inaccuracy of economic data validation, resulting in misplacement of students in inappropriate tuition fee groups.

This study recommends improving policy communication systems, implementing stricter data validation, and enhancing non-financial welfare support, such as counseling services and an inclusive social environment. These measures are expected to make the Single Tuition Fee Policy a more effective instrument in holistically supporting student welfare, both in terms of access to education and socio-economic aspects.

Keyword: Policy, Tuition Fees, Welfare, Students

ABSTRAK

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal terhadap kesejahteraan mahasiswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, melibatkan mahasiswa, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi, terutama dalam meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, ketidakjelasan mekanisme penentuan Uang Kuliah Tunggal dan kurangnya informasi mengenai prosedur banding menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Tantangan lain yang ditemukan adalah validasi data ekonomi yang kurang akurat, yang berdampak pada penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai.

Penelitian ini merekomendasikan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih ketat, dan peningkatan dukungan kesejahteraan non-finansial, seperti layanan konseling dan lingkungan sosial inklusif. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh, baik dari segi akses pendidikan maupun aspek sosial-ekonomi.

Kata Kunci : Kebijakan, Uang Kuliah, Kesejahteraan, Mahasiswa

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang dijamin untuk mendapatkan pendidikan layak sebagai bekal pengetahuan guna mendukung keberlangsungan hidup. Hak ini diatur dalam UUD 1945 pasal 31, yang mewajibkan pemerintah memberikan akses pendidikan dan membiayainya dengan mengalokasikan setidaknya 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan (Rahman et al., 2017). Komitmen ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok kurang mampu, mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang.

Perguruan tinggi berperan penting dalam mendorong kemajuan pendidikan melalui Tri Dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mahasiswa diharapkan menerapkan ilmu yang mereka peroleh demi kontribusi nyata bagi masyarakat. Selain itu, perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi melalui aktivitas akademis dan organisasi, yang memperkaya keterampilan sosial, kemampuan inovasi, dan persiapan menghadapi dunia kerja.

Universitas Lampung (Unila), sebagai salah satu perguruan tinggi negeri, melaksanakan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk menyatukan seluruh biaya kuliah dalam satu besaran tetap setiap semester. Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil dan merata, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi dalam penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal, minimnya informasi kepada mahasiswa, serta ketidaksesuaian besaran Uang Kuliah Tunggal dengan kondisi ekonomi keluarga, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan orang tua.

Kondisi tersebut mendorong perlunya analisis mendalam terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Unila dari perspektif sosial untuk memahami dampaknya terhadap kesejahteraan mahasiswa secara holistik. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal guna memberikan rekomendasi perbaikan agar kebijakan tersebut dapat mendukung kesejahteraan mahasiswa secara efektif. Berdasarkan fenomena yang ada, penelitian ini mengangkat judul “Kebijakan Uang Kuliah Tunggal dalam Mendukung Kesejahteraan Mahasiswa Pendekatan Sosial (Studi pada Universitas Lampung Tahun 2023).”

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem pembayaran kuliah yang lebih adil dan terjangkau di perguruan tinggi negeri. Uang Kuliah Tunggal mengelompokkan mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga, didukung oleh data seperti slip gaji dan laporan pajak. Prinsip subsidi silang diterapkan, di mana mahasiswa dari keluarga mampu membayar lebih tinggi untuk membantu mereka yang kurang mampu. Penetapan Uang Kuliah Tunggal melibatkan pengumpulan data ekonomi mahasiswa, verifikasi dokumen, dan pengelompokan berdasarkan kriteria tertentu, dengan transparansi sebagai salah satu prioritas utama (Ardiansyah et al., 2022).

Konsep Uang Kuliah Tunggal bertujuan menyederhanakan pembayaran pendidikan menjadi satu komponen biaya tetap per semester, menghapus berbagai biaya tambahan seperti uang gedung dan praktikum. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa (Rahmi, 2024). Dengan

menerapkan prinsip keadilan, mahasiswa dari keluarga kurang mampu membayar lebih rendah, sementara yang mampu berkontribusi lebih besar (Purnomo & Saifullah, 2022). Uang Kuliah Tunggal juga memastikan perguruan tinggi dapat merencanakan anggaran dengan lebih baik untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.

Uang Kuliah Tunggal didukung oleh regulasi seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 (Undang-undang, 2012). Sistem ini mengatur pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi, dengan kuota minimum untuk kelompok mahasiswa berpenghasilan rendah. Meski demikian, terdapat tantangan dalam penerapan Uang Kuliah Tunggal, seperti ketidakpuasan terhadap penetapan biaya dan mekanisme banding yang kurang memadai. Hal ini menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung mahasiswa (Ardiansyah et al., 2022).

Kesejahteraan mahasiswa didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial, memungkinkan individu untuk hidup layak dan berfungsi sosial. Konsep ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan sosial, serta penghargaan atas hak dan martabat manusia (Rahmi, 2024). Dalam konteks pendidikan tinggi, kesejahteraan mahasiswa melibatkan dukungan mental, fisik, akademis, dan sosial, yang membantu mereka mengatasi tantangan selama studi (Yanti, 2023).

Teori keadilan distribusi, seperti yang dikemukakan John Rawls, menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang menguntungkan kelompok paling kurang beruntung (Teguh Prasetyo, 2019). Dalam konteks Uang Kuliah Tunggal, prinsip ini diterapkan melalui pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi dan subsidi silang untuk memastikan akses pendidikan yang adil. Dengan memprioritaskan keadilan, sistem Uang Kuliah Tunggal bertujuan meringankan beban mahasiswa dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung keberlanjutan pendidikan di perguruan tinggi.

Pendekatan sosial dalam kesejahteraan mahasiswa melibatkan dukungan menyeluruh, mulai dari kesehatan mental, fisik, hingga pengembangan karir (Lele, 2024). Institusi pendidikan tinggi diharapkan menyediakan layanan konseling, fasilitas belajar, dan program pengembangan keterampilan. Selain itu, dukungan finansial melalui beasiswa dan kebijakan yang inklusif turut berperan penting (Rahmi, 2024). Pendekatan ini tidak hanya memastikan

keberhasilan akademis, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa untuk kehidupan profesional dan pribadi yang lebih baik.

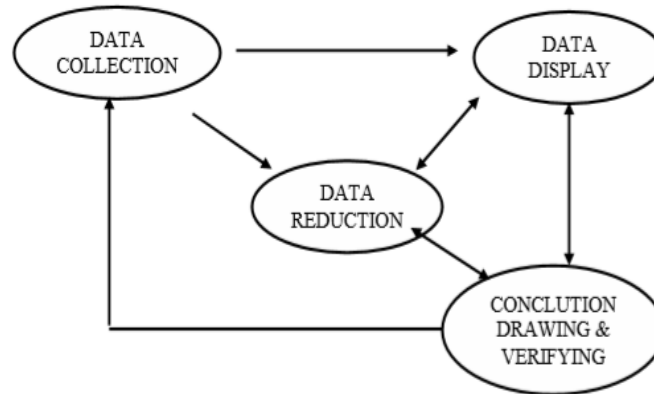
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena secara mendalam dalam konteks naturalistic (Suprayitno et al., 2024). Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan interpretatif mengenai makna di balik tindakan dan interaksi social (Hildawati et al., 2024). Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) memengaruhi kesejahteraan mahasiswa, terutama dalam konteks sosial dan ekonomi mereka. Pemilihan metode kualitatif juga didasarkan pada kompleksitas fenomena yang diteliti, memfasilitasi interaksi mendalam antara peneliti dan responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman, pandangan, dan perspektif responden dengan rinci. Observasi memberikan kesempatan untuk melihat perilaku dan interaksi responden dalam konteks alamiah, sementara studi dokumentasi melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait seperti laporan, arsip, dan kebijakan. Kombinasi metode ini menghasilkan data yang lebih komprehensif dan kredibel, memperkuat temuan penelitian (Suprayitno et al., 2024).

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup hasil wawancara, observasi, dan survei, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, literatur akademis, dan basis data (Pugu et al., 2024). Pemilihan informan melibatkan individu dengan keahlian di bidang Uang Kuliah Tunggal, praktisi, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang terkena dampak kebijakan. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian mencakup berbagai sudut pandang untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai dampak kebijakan Uang Kuliah Tunggal.

Untuk Lebih jelas bias kita lihat pada gambar berikut:



Gambar.1 Komponen-Komponen Analisa Data Model Interaktif

Analisis data dilakukan secara interaktif, melibatkan reduksi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Validitas data dijaga dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi, dokumen, dan literatur terkait (Pugu et al., 2024). Lokasi penelitian bertempat di Universitas Lampung, dengan jadwal yang mencakup tahap pra-penelitian hingga penyusunan laporan. Penelitian ini dirancang untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kebijakan Uang Kuliah Tunggal dan dampaknya terhadap kesejahteraan mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung telah memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah mahasiswa, kebijakan UKT yang mengklasifikasikan tarif berdasarkan penghasilan orang tua dinilai membantu meringankan beban keuangan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, kebijakan ini juga menghadapi beberapa kendala, terutama terkait transparansi dan mekanisme penentuan besaran Uang Kuliah Tunggal.

Sebagian besar mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana kelompok Uang Kuliah Tunggal mereka ditentukan. Ketidakjelasan indikator yang digunakan untuk menetapkan kelompok Uang Kuliah

Tunggal menyebabkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Beberapa responden menyebutkan bahwa informasi terkait penyesuaian dan banding Uang Kuliah Tunggal sering kali kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga banyak mahasiswa tidak mengetahui hak mereka untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap besaran Uang Kuliah Tunggal yang ditetapkan.

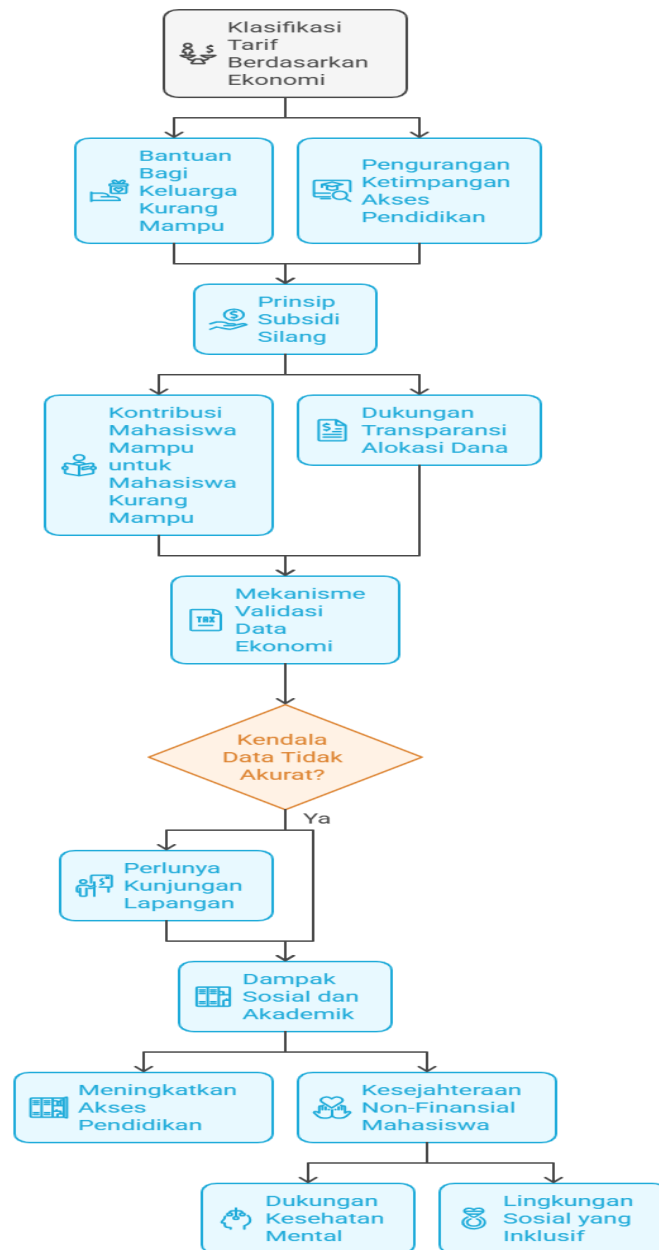
Temuan dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa subsidi silang yang menjadi dasar kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah berjalan sesuai tujuan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Mahasiswa dari keluarga mampu mengaku tidak keberatan membayar Uang Kuliah Tunggal lebih tinggi, asalkan dana tersebut dikelola secara transparan untuk mendukung mahasiswa kurang mampu. Namun, beberapa mahasiswa dari kelompok Uang Kuliah Tunggal rendah merasa bahwa fasilitas dan pelayanan pendidikan yang mereka terima belum sebanding dengan kebutuhan mereka, seperti akses ke bahan ajar, laboratorium, atau dukungan akademis.

Studi dokumentasi mengungkapkan bahwa Universitas Lampung telah mengikuti pedoman nasional terkait Uang Kuliah Tunggal yang diatur oleh Permendikbud. Namun, hasil penelitian juga mencatat adanya tantangan dalam validasi data ekonomi mahasiswa. Dalam beberapa kasus, data yang tidak akurat atau kurang lengkap menyebabkan kesalahan dalam penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal. Hal ini diperparah oleh kurangnya kunjungan lapangan atau verifikasi tambahan untuk memastikan kondisi ekonomi mahasiswa yang sebenarnya.

Dari perspektif sosial, kebijakan Uang Kuliah Tunggal telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mahasiswa, terutama dalam hal akses pendidikan. Mahasiswa yang sebelumnya terancam putus kuliah karena alasan ekonomi mengaku bahwa kebijakan Uang Kuliah Tunggal memungkinkan mereka melanjutkan studi. Namun, aspek kesejahteraan non-finansial, seperti dukungan kesehatan mental dan sosial, masih kurang diperhatikan. Banyak mahasiswa mengungkapkan perlunya pendampingan psikologis untuk membantu mereka mengatasi tekanan akademik dan ekonomi yang mereka hadapi selama studi.

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya peran universitas dalam menciptakan lingkungan sosial yang inklusif. Beberapa responden menyebutkan bahwa kegiatan organisasi mahasiswa, program bimbingan, dan layanan konsultasi dapat berkontribusi

pada peningkatan kesejahteraan secara holistik. Meski demikian, akses terhadap program-program ini masih terbatas, terutama bagi mahasiswa dari kelompok Uang Kuliah Tunggal rendah yang memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi.



Gambar. 2 Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Secara keseluruhan, kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung telah berperan penting dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa dari segi akses

pendidikan. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal transparansi, validasi data, dan penyediaan dukungan sosial yang lebih menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan universitas untuk meningkatkan komunikasi terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal, memperbaiki sistem verifikasi data, dan memperluas akses terhadap program dukungan kesejahteraan mahasiswa untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal dapat tercapai secara optimal.

2. Pembahasan

Implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Kebijakan ini, dengan prinsip subsidi silang, mencerminkan upaya untuk mewujudkan pemerataan pendidikan melalui pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini masih terhambat oleh kurangnya transparansi dalam mekanisme penentuan kelompok Uang Kuliah Tunggal. Ketidapahaman mahasiswa terhadap indikator penentuan Uang Kuliah Tunggal memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk perbaikan komunikasi dan sosialisasi kebijakan.

Ketidajelasan indikator yang digunakan untuk menentukan kelompok Uang Kuliah Tunggal tidak hanya menyebabkan kebingungan, tetapi juga ketidakpuasan di kalangan mahasiswa. Sebagai kebijakan yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu, transparansi dalam penetapan besaran Uang Kuliah Tunggal menjadi kunci keberhasilan. Minimnya informasi yang diterima mahasiswa tentang prosedur banding dan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal menunjukkan kurangnya perhatian terhadap aspek pelayanan administratif. Hal ini dapat memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap keadilan kebijakan tersebut.

Prinsip subsidi silang, meskipun telah berjalan sesuai tujuan, belum sepenuhnya dirasakan optimal oleh mahasiswa. Mahasiswa dari kelompok Uang Kuliah Tunggal rendah merasa bahwa fasilitas yang mereka peroleh belum memadai, menunjukkan adanya kesenjangan antara kontribusi keuangan dan manfaat yang diterima. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan persepsi antara mahasiswa kelompok Uang Kuliah

Tunggal tinggi dan rendah. Oleh karena itu, transparansi dalam alokasi dana serta peningkatan kualitas layanan pendidikan harus menjadi fokus perbaikan kebijakan.

Studi dokumentasi mengungkapkan adanya tantangan validasi data ekonomi mahasiswa. Data yang kurang akurat atau tidak lengkap sering kali menjadi penyebab utama penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak sesuai. Proses verifikasi yang lebih ketat, termasuk kunjungan lapangan untuk memastikan kondisi ekonomi yang sebenarnya, diperlukan untuk mendukung keadilan dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal. Dalam konteks ini, perbaikan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi untuk validasi data dapat menjadi solusi yang efektif.

Dari perspektif sosial, kebijakan Uang Kuliah Tunggal terbukti mampu mencegah potensi putus kuliah mahasiswa karena alasan ekonomi. Namun, perhatian terhadap kesejahteraan non-finansial, seperti dukungan kesehatan mental dan sosial, masih kurang diperhatikan. Mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik dan ekonomi membutuhkan pendampingan psikologis serta lingkungan sosial yang mendukung. Program seperti layanan konseling dan kegiatan sosial inklusif dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa secara holistik.

Peran universitas dalam menciptakan lingkungan inklusif juga menjadi faktor penting yang perlu diperkuat. Mahasiswa mengapresiasi keberadaan organisasi dan program bimbingan, namun akses terhadap fasilitas ini masih terbatas bagi kelompok tertentu. Mahasiswa dari kelompok Uang Kuliah Tunggal rendah sering kali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat diakses oleh seluruh mahasiswa tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Universitas Lampung telah memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek transparansi, validasi data, dan dukungan kesejahteraan sosial. Rekomendasi yang diajukan mencakup perbaikan sistem komunikasi kebijakan, peningkatan akurasi validasi data, serta penguatan program pendukung kesejahteraan mahasiswa. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi. Melalui prinsip subsidi silang dan pengelompokan tarif berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga, kebijakan ini membantu meringankan beban finansial mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme penentuan UKT dan kurangnya informasi terkait prosedur banding telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa.

Efektivitas kebijakan Uang Kuliah Tunggal masih terkendala oleh tantangan dalam validasi data ekonomi mahasiswa, termasuk data yang tidak akurat dan kurang lengkap. Hal ini mengakibatkan penempatan kelompok Uang Kuliah Tunggal yang tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Transparansi dalam alokasi dana dan peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa kontribusi mahasiswa dari keluarga mampu benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, aspek kesejahteraan non-finansial mahasiswa, seperti dukungan kesehatan mental dan sosial, perlu mendapatkan perhatian lebih. Program layanan konseling, bimbingan, dan lingkungan sosial yang inklusif dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa secara holistik. Dengan perbaikan sistem komunikasi kebijakan, validasi data yang lebih baik, dan dukungan kesejahteraan yang menyeluruh, kebijakan Uang Kuliah Tunggal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M., Suharto, T., & Farid, A. S. (2022). Upaya penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu pada perguruan tinggi. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4432–4441.
- Hildawati, H., Suhirman, L., Prisuna, B. F., Husnita, L., Mardikawati, B., Isnaini, S., Wakhyudin, W., Setiawan, H., Hadiyat, Y., & Sroyer, A. M. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif & Aplikasi Pengolahan Analisa Data Statistik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Indonesia, R. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Lele, G. (2024). *Kebijakan Publik Untuk Transformasi Sosial: Sebuah Pendekatan Kritis-Agonistik*. UGM PRESS.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Purnomo, A., & Saifullah, S. (2022). Tinjauan Utilitarianisme Hukum Atas Penerapan Regulasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 229–240.
- Rahman, A., Sh, M. H., & Baso Madiung, S. H. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Rahmi, S. (2024). *Manajemen Perguruan Tinggi*. Prenada Media.
- Suprayitno, D., Ahmad, A., Tartila, T., & Aladdin, Y. A. (2024). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF: Teori Komprehensif dan Referensi Wajib bagi Peneliti*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Teguh Prasetyo, S. H. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.
- Yanti, I. (2023). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Penetapan Nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) di IAIN Parepare*. IAIN PAREPARE.